

BAB II

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

A. Deskripsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul

1. Profil

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, dengan kedudukan sebagai pendukung atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kepegawaian serta perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 60 Tahun 2008 tentang “Rincian Tugas, Fungsi dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul”.

2. Visi dan Misi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul

Dalam menjalankan tugasnya, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul mempunyai visi yang telah dirumuskan dan disepakati bersama, yaitu “Pengelola Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Handal”. Visi tersebut mengandung pengertian bahwa BKPP Kabupaten Bantul ingin mewujudkan manajemen kepegawaian yang lebih berorientasi kepada profesionalisme SDM Aparatur Sipil Negara, yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan

pembangunan, tidak partisan dan netral, keluar dari pengaruh semua golongan dan partai politik dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul sebagai langkah nyata atau tindakan yang dilaksanakan, sehingga hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata pada hasil misi tersebut. Dari visi yang telah ditetapkan dapat dirumuskan Misi yang diemban oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas manajemen kepegawaian
- 2) Meningkatkan pelayanan prima bidang kepegawaian.

3. Tupoksi

Adapun tugas pokok dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul sebagai berikut :

- 1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten bantul merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah
- 2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

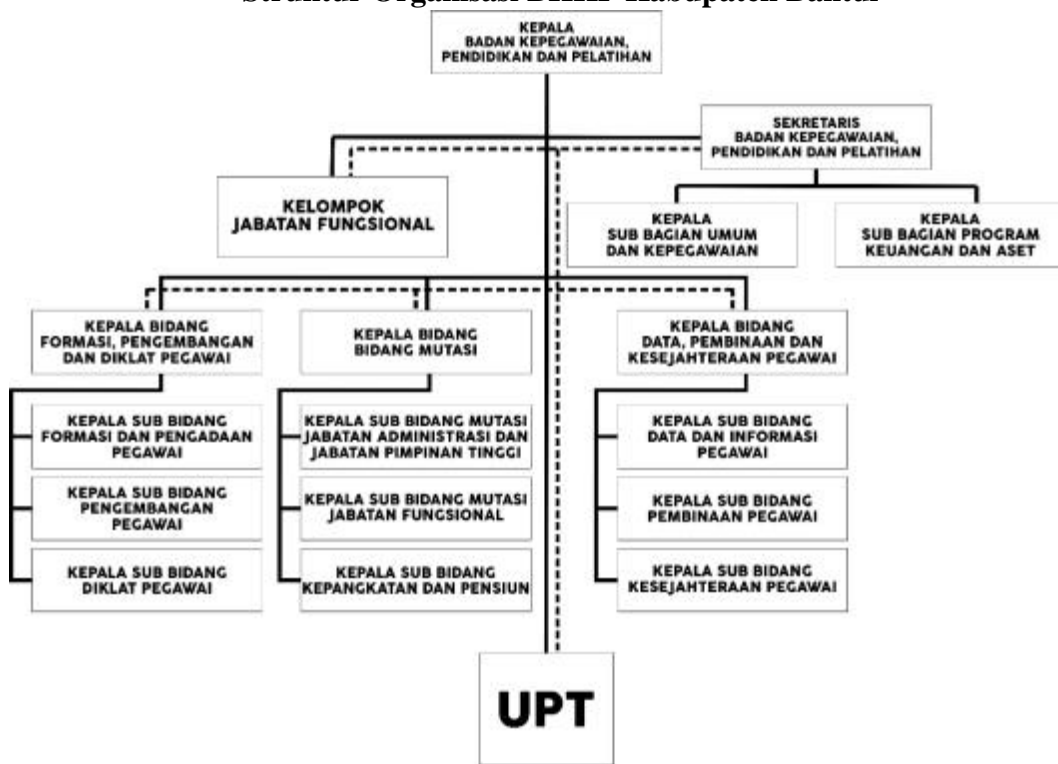
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten bantul dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumus kebijakan teknis bidang kepegawaian
- 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang kepegawaian
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kepegawaian
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dnegan tugas dan fungsinya.

4. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten bantul

Susunan organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten bantul, terdiri atas kepala badan, sekretariat yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) Sub. Bagian, 4 bidang dengan beberapa Sub. Bidang, serta kelompok Jabtan Fungsional. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan. Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang kepala Sub bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris. Dan masing-masing sub bidang dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi BKPP Kabupaten Bantul



Sumber : LKJ BKPP Kabupaten Bantul Tahun 2017

B. Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul

Berhasil atau tidaknya suatu instansi dalam menyelenggarakan roda birokrasi tergantung terhadap Sumber Daya Manusia yang ada di dalamnya. Seperti halnya Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul, dalam

menyelenggarakan dan melaksanakan tugas serta ebrbagai kegiatan progam sangat ditentukan oleh kemampuan sumberdaya manusia yang tersedia. Karena kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian dan kemampuan mendukung dalam peningkatan kinerja SDMnya.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul terdiri dari 1 (satu) eselon II, (empat) eselon IV dan 11 (sebelas) eselon IV. Data pegawai per 31 Desember 2016 adalah 51 orang dengan perincian 32 orang pegawai laki-laki dan 18 orang pegawai perempuan.

1. Data Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambar 2.2
Data Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul Per 31 Desember 2016 Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017

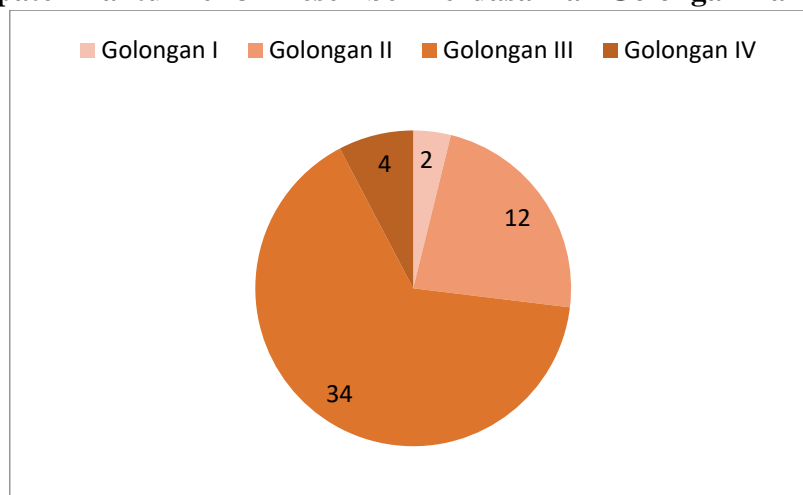


Sumber : LKJ BKPP Kabupaten Bantul Tahun 2017

Dilihat dari grafik di atas bahwasannya Aparatur Sipil Negara di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul bahwasannya ASN laki-laki lebih dominan dibanding dengan ASN perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan gender yang terjadi antara pegawai laki-laki dan perempuan tidak terlalu besar. Namun hal ini tidak menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul.

2. Data Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul Per 31 Desember Berdasarkan Golongan Tahun 2017

Gambar 2.3
Data Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul Per 31 Desember Berdasarkan Golongan Tahun 2017



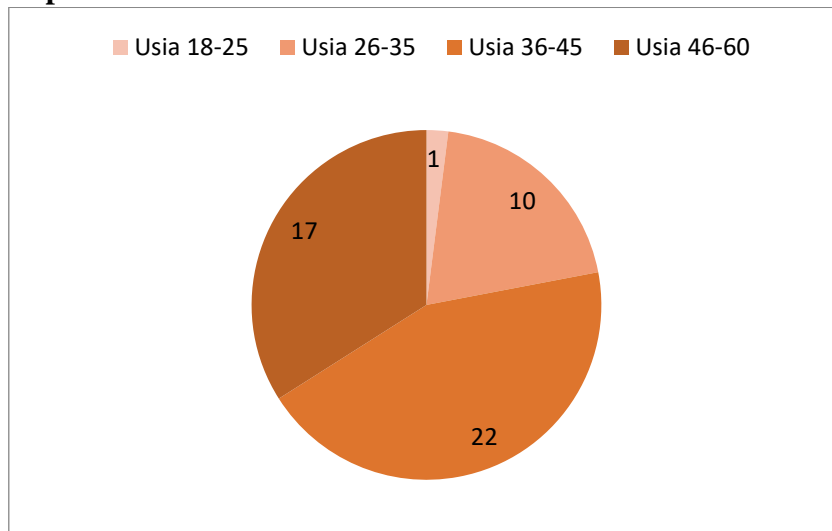
Sumber : LKJ BKPP Kabupaten Bantul Tahun 2017

Berdasarkan grafik di atas klasifikasi jumlah pegawai berdasarkan golongan di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul sebagai berikut: golongan I, golongan II, golongan III dan golongan IV. Pegawai dnegan golongan I berjumlah 2 orang, pegawai dengan golongan II berjumlah 12 pegawai, pegawai

dengan golongan III berjumlah 34 pegawai dan pegawai dengan golongan IV berjumlah 4 pegawai. Dari keseluruhan pegawai di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul, didominasi pegawai golongan III yaitu terdapat 34 pegawai. Hal ini akan menjadi faktor pendukung dalam peningkatan kinerja BKPP Kabupaten Bantul karena dengan golongan pegawai yang semakin tinggi berarti pegawai tersebut memiliki kompetensi yang lebih memadai dibandingkan dengan pegawai yang masih bergolongan III ke bawah karena semakin tinggi golongan pegawai maka tuntutan kinerja mereka semakin besar juga.

3. Data Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul Per 31 Desember Berdasarkan Usia Tahun 2017

Gambar 2.4
Data Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul Per 31 Desember Berdasarkan Usia Tahun 2017

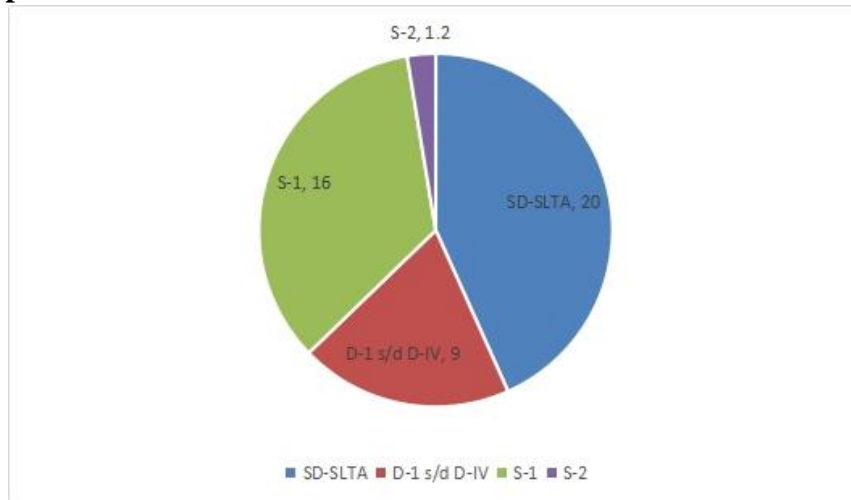


Sumber : LKJ BKPP Kabupaten Bantul Tahun 2017

Dari grafik di atas bahwasannya pegawai yang bekerja di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul banyak yang berada di rentang usia optimal, dimana pegawai yang berada di usia 18-25 tahun ada 1 pegawai, pegawai di usia 26-35 tahun ada 10 pegawai, pegawai di usia 36-45 ada 22 pegawai dan pegawai yang berada di rentang usia 46-60 ada 17 pegawai. Sehingga dengan pegawai yang berada di rentang usia optimal yaitu rentang usia 36-45 tahun akan menjadi faktor pendukung dalam pencapaian kinerja organisasi dalam menjalankan tugas dan program yang ada.

4. Data Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul Per 31 Desember Berdasarkan Pendidikan Tahun 2017

Gambar 2.5
Data Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul Per 31 Desember Berdasarkan Pendidikan Tahun 2017



Sumber : LKJ BKPP Kabupaten Bantul Tahun 2017

Berdasarkan grafik di atas bahwasannya tingkat pendidikan Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan lebih banyak memiliki latar

pendidikan dari SLTA kebawah. Pada dasarnya tingkat pendidikan Aparatur Sipil Negara juga menjadi faktor pendukung dalam pencapaian kinerja organisasi. Sehingga dengan kapasitas Sumber Daya Aparatur yang memadai akan mampu mencapai target yang telah direncanakan organisasi.

C. Aparatur Sipil Negara yang Lolos Seleksi Terbuka Tahun 2017

Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Bantul mengadakan seleksi terbuka untuk menempati pada Jabatan Tinggi Pimpinan Tinggi Pratama dengan jabatan administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Jabatan Tinggi Pratama yang ditempati antara lain Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Dinas Perhubungan, dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Dari seleksi terbuka ini terdapat 43 Aparatur Sipil Negara yang ikut dalam seleksi terbuka dan terdapat 7 Aparatur Sipil Negara yang lolos dalam tahap akhir.

Tabel 2.1
Hasil Seleksi Tahap Akhir Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2016

No	Nama	JPT yang Dilamar
1	Danu Suswaryanta, SH	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
2	Aris Suharyanto, S.Sos, MM	Dinas Perhubungan
3	Drs. Agus Sulistyana, MM	Dinas perpustakaan dan Kearsipan
4	Bobot Ariffi' Aidin,S.T., M.T	Dinas Pekerjaan Umum. Perumahan dan Kawasan Pemukiman

5	Nugroho Eko Setyanto, S.Sos, MM	Dinas Komunikasi dan Informatika
6	Ir. Isa Budihartomo,MT	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
7	Ir. Sri Muryuyuwanti,MM	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Sumber : Sub-Bidang Mutasi Jabatan BKPP Kabupaten Bantul 2016

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa tujuh Aparatur Sipil Negara dinyatakan lolos dan menempati jabatan administrator di masing-masing dinas yang lowong di Pemerintah Kabupaten Bantul. Aparatur Sipil Negara yang berhasil lolos dalam seleksi terbuka sebelumnya telah melalui beberapa tahapan dalam seleksi dari tahap administrasi, penyerahan makalah, *assesment center* atau uji kompetensi, presentasi makalah dan tahap wawancara. Dengan begitu diharapkan mampu menghasilkan Aparatur Sipil Negara yang memiliki kualitas dan kuantitas sehingga mampu bertanggung jawab atas jabatan yang akan didudukinya. Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah Kabupaten Bantul dalam penataan pegawai di lingkungan pemerintahannya dan merupakan salah satu amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwasannya “Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam mengelola manajemen Aparatur Sipil Negara”.